

ABSTRAK

Kota Tasikmalaya pada pemilu 2019 kemarin menduduki peringkat kesatu tingkat partisipasi pemilih se-Jawa Barat, tetapi partisipasi pengawasan tidak berbanding lurus dengan partisipasi pemilih. Kesadaran pengawasan pemilu pada 2019 begitu rendah dilihat dari orang-orang yang berani melapor. Berdasarkan data Bawaslu Kota Tasikmalaya, pada pemilihan umum Tahun 2019 terdapat 22 pelanggaran pada tahapan pemilu. Program dan inovasi pengawasan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penelitian ini ingin mengetahui peran Bawaslu di Kota Tasikmalaya dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menghadapi pemilu 2024 dilihat dari maraknya pelanggaran pemilu Tahun 2019 dan tingkat laporan masyarakat yang rendah. Pemilu menjadi sarana lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu) dalam memberikan pendidikan politik lewat pengawasan partisipatifnya kepada pemilih.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan peneliti untuk memperkuat penelitian ini yakni menggunakan teori pendidikan politik. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *Purposive sampling* serta dilakukan pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Miles dan Hubberman dengan validitas data yang dipilih yaitu triangulasi sumber yang menggunakan studi literatur, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data lalu menggunakan. Hasil penelitian ini yakni Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan peran dalam pengawasan partisipatif sebagai sarana pendidikan politik menjelang Pemilu 2024, bahwa Bawaslu telah melakukan pendidikan politik melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Bawaslu Mengajar, dan Sosialisasi berupa Warung pengawasan menjelang Pemilu 2024. Selanjutnya sosialisasi kepada pihak majelis dan para pemilih pemula yang masih minim pengetahuan tentang pemilu, diantaranya kepada siswa-siswi SMA/SMK. Serta adanya aplikasi sigap lapor salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan laporan dari masyarakat. Proses pengawasasan partisipatif sesuai dengan teori yang dipakai yaitu pendidikan politik, aktivitas yang dilakukan diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Pengawasan Partisipatif, Bawaslu